



WALI KOTA BIMA

**PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR 70 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

2023



WALI KOTA BIMA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BIMA
NOMOR 70 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BIMA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pembentukan Daerah Kota Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4188);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan

- Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1871);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
 22. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2022 Nomor 243, Tambahan Lembaran Daerah Kota Bima Nomor 111);
 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kota Bima Tahun 2023 Nomor 253).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bima.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bima.
3. Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan.

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp809.556.428.302,00 (delapan ratus sembilan milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

(1) Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp73.566.402.930,00 (tujuh puluh tiga milyar lima ratus enam puluh enam juta empat ratus dua ribu sembilan ratus tiga puluh rupiah), yang terdiri atas:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

- (2) Pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp25.391.325.685,00 (dua puluh lima milyar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu enam ratus delapan puluh lima rupiah);
- (3) Retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.597.414.371,00 (dua puluh enam milyar lima ratus sembilan puluh tujuh juta empat ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.656.772.700,00 (satu milyar enam ratus lima puluh enam juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus rupiah);
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp19.920.890.174,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus dua puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu seratus tujuh puluh empat rupiah).

Pasal 5

- (1) Anggaran pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. pajak hotel;
 - b. pajak restoran;
 - c. pajak hiburan;
 - d. pajak reklame;
 - e. pajak penerangan jalan;
 - f. pajak parkir;
 - g. pajak air tanah;
 - h. pajak sarang burung walet;
 - i. pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - j. pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2); dan
 - k. bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB);
- (2) Pajak hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.112.000.000,00 (satu milyar seratus dua belas juta rupiah);

- (3) Pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.502.610.435,00 (dua milyar lima ratus dua juta enam ratus sepuluh ribu empat ratus tiga puluh lima rupiah);
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp54.075.000,00 (lima puluh empat juta tujuh puluh lima ribu rupiah);
- (5) Pajak reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp774.440.250,00 (tujuh ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
- (6) Pajak penerangan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.050.000.000,00 (sepuluh milyar lima puluh juta rupiah);
- (7) Pajak parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- (8) Pajak air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- (9) Pajak sarang burung walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp74.200.000,00 (tujuh puluh empat juta dua ratus ribu rupiah);
- (10) Pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- (11) Pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBP2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp5.100.000.000,00 (lima milyar seratus juta rupiah);
- (12) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).

Pasal 6

- (1) Anggaran retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. retribusi jasa umum;
 - b. retribusi jasa usaha; dan

- c. retribusi perizinan tertentu;
- (2) Retribusi jasa umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp19.430.700.075,00 (sembilan belas milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus ribu tujuh puluh lima rupiah);
- (3) Retribusi jasa usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.166.714.296,00 (enam milyar seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat belas ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah);
- (4) Retribusi perizinan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Pasal 7

- (1) Anggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c terdiri atas bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - b. jasa giro;
 - c. hasil pengelolaan dana bergulir;
 - d. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - e. Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk Lain; dan
 - f. Pendapatan denda pajak daerah;
- (2) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp800.826.000,00 (delapan ratus juta delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- (3) Jasa giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (4) Hasil pengelolaan dana bergulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp5.365.000,00 (lima juta tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- (5) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar

- Rp3.026.145.840,00 (tiga milyar dua puluh enam juta seratus empat puluh lima ribu delapan ratus empat puluh rupiah);
- (6) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.488.053.334,00 (lima belas milyar empat ratus delapan puluh delapan juta lima puluh tiga ribu tiga ratus tiga puluh empat rupiah);
 - (7) Pendapatan denda pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp726.225.039.663,00 (tujuh ratus dua puluh enam milyar dua ratus dua puluh lima juta tiga puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antar daerah;
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp664.037.977.000,00 (enam ratus enam puluh empat milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp62.187.062.663,00 (enam puluh dua milyar seratus delapan puluh tujuh juta enam puluh dua ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah).

Pasal 10

- (1) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a terdiri atas Dana Perimbangan;
- (2) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp664.037.977.000,00 (enam ratus enam puluh empat milyar tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Pasal 11

Anggaran pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b terdiri atas Pendapatan bagi hasil.

Pasal 12

Anggaran lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp9.764.985.709,00 (sembilan milyar tujuh ratus enam puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus sembilan rupiah).

Pasal 13

Anggaran belanja daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp858.556.428.302,00 (delapan ratus lima puluh delapan milyar lima ratus lima puluh enam juta empat ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua rupiah), yang terdiri dari:

- a. belanja operasional;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

Pasal 14

- (1) Anggaran belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp740.402.385.787,00 (tujuh ratus empat puluh milyar empat ratus dua juta tiga ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah), terdiri dari:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja hibah; dan
 - d. belanja bantuan sosial;
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp437.585.778.868,00 (empat ratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah);
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp256.444.820.668,00 (dua ratus lima puluh enam milyar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus dua puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah);
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp42.773.486.251,00 (empat puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);

- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp3.598.300.000,00 (tiga milyar lima ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 15

- (1) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a terdiri dari:
- a. belanja gaji dan tunjangan ASN;
 - b. belanja tambahan penghasilan ASN;
 - c. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN;
 - d. belanja gaji dan tunjangan DPRD;
 - e. belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH;
 - f. belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH; dan
 - g. belanja pegawai BLUD;
- (2) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.925.256.557,00 (dua ratus sembilan puluh tujuh milyar sembilan ratus dua puluh lima juta dua ratus lima puluh enam ribu lima ratus lima puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja tambahan penghasilan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp66.971.478.564,00 (enam puluh enam milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus enam puluh empat rupiah);
- (4) Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp57.657.984.312,00 (lima puluh tujuh milyar enam ratus lima puluh tujuh juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- (5) Belanja gaji dan tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.121.617.786,00 (sebelas milyar seratus dua puluh satu juta enam ratus tujuh belas ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah);
- (6) Belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp521.399.585,00 (lima ratus dua puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah);

- (7) Belanja penerimaan lainnya pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp526.000.000,00 (lima ratus dua puluh enam juta rupiah); dan
- (8) Belanja pegawai BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.862.042.064,00 (dua milyar delapan ratus enam puluh dua juta empat puluh dua ribu enam puluh empat rupiah).

Pasal 16

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. Belanja barang dan jasa BOS; dan
 - g. Belanja barang dan jasa BLUD;
- (2) Belanja barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp73.403.635.187,00 (tujuh puluh tiga milyar empat ratus tiga juta enam ratus tiga puluh lima ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah);
- (3) Belanja jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp97.168.551.753,00 (sembilan puluh tujuh milyar seratus enam puluh delapan juta lima ratus lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh tiga rupiah);
- (4) Belanja pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp11.270.735.230,00 (sebelas milyar dua ratus tujuh puluh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu dua ratus tiga puluh rupiah);
- (5) Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp43.319.332.709,00 (empat puluh tiga milyar tiga ratus sembilan belas juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sembilan rupiah);
- (6) Belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- huruf e direncanakan sebesar Rp3.583.315.000,00 (tiga milyar lima ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu rupiah);
- (7) Belanja barang dan jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp20.097.240.000,00 (dua puluh milyar sembilan puluh tujuh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- (8) Belanja barang dan jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp7.602.010.789,00 (tujuh milyar enam ratus dua juta sepuluh ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah).

Pasal 17

- (1) Belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - b. belanja hibah dana BOS; dan
 - c. belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik;
- (2) Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp38.983.070.251,00 (tiga puluh delapan milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta tujuh puluh ribu dua ratus lima puluh satu rupiah);
- (3) Belanja hibah dana BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.812.560.000,00 (dua milyar delapan ratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu rupiah);
- (4) Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp977.856.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Pasal 18

- (1) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. belanja bantuan sosial kepada keluarga; dan
 - c. belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat;

- (2) Belanja bantuan sosial kepada individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.500.000,00 (seratus sembilan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- (3) Belanja bantuan sosial kepada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.578.800.000,00 (dua milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);
- (4) Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Pasal 19

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp114.990.692.138,00 (seratus empat belas milyar sembilan ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri dari:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya;
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.842.449.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh dua juta empat ratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.934.169.076,00 (tujuh belas milyar sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh sembilan ribu tujuh puluh enam rupiah);
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp43.281.871.893,00 (empat puluh tiga milyar dua ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga);
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp52.208.502.169,00 (lima puluh dua milyar dua ratus delapan juta lima ratus dua ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp173.750.000,00 (seratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah)

Pasal 20

Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a terdiri dari atas belanja modal tanah.

Pasal 21

- (1) Modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat bengkel dan alat ukur;
 - d. belanja modal alat pertanian
 - e. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - f. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - g. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - h. belanja modal alat laboratorium;
 - i. belanja modal komputer;
 - j. belanja modal peralatan olahraga; dan
 - k. belanja modal peralatan dan mesin BLUD;
- (2) Belanja modal alat besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah);
- (3) Belanja modal alat angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp4.052.522.500,00 (empat milyar lima puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- (4) Belanja modal alat bengkel dan alat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp234.470.500,00 (dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah);

- (5) Belanja modal alat pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.225.000,00 (lima juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- (6) Belanja modal alat kantor dan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.718.063.770,00 (satu milyar tujuh ratus delapan belas juta enam puluh tiga ribu tujuh ratus tujuh puluh rupiah);
- (7) Belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp235.243.940,00 (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus empat puluh rupiah);
- (8) Belanja modal alat kedokteran dan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.509.948.500,00 (enam milyar lima ratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah);
- (9) Belanja modal alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp281.017.140,00 (dua ratus delapan puluh satu juta tujuh belas ribu seratus empat puluh rupiah);
- (10) Belanja modal komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp2.462.557.500,00 (dua milyar empat ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- (11) Belanja modal peralatan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah)
- (12) Belanja modal peralatan dan mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.801.820.226,00 (satu milyar delapan ratus satu juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

Pasal 22

- (1) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. belanja modal bangunan gedung; dan
 - b. belanja modal tugu titik kontrol/pasti;

- (2) Belanja modal bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp42.881.871.893,00 (empat puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh tiga rupiah);
- (3) belanja modal tugu titik kontrol/pasti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

Pasal 23

- (1) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf d terdiri dari:
 - a. belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. belanja modal bangunan air;
 - c. belanja modal instalasi; dan
 - d. belanja modal jaringan;
- (2) Belanja modal jalan dan jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp21.940.132.019,00 (dua puluh satu milyar sembilan ratus empat puluh juta seratus tiga puluh dua ribu sembilan belas rupiah);
- (3) Belanja modal bangunan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.683.370.150,00 (dua puluh lima milyar enam ratus delapan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh ribu seratus lima puluh rupiah);
- (4) Belanja modal instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.705.000.000,00 (satu milyar tujuh ratus lima juta rupiah);
- (5) Belanja modal jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.880.000.000,00 (dua milyar delapan ratus delapan puluh juta rupiah).

Pasal 24

Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf e terdiri dari atas belanja modal bahan perpustakaan.

Pasal 25

Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf f terdiri dari atas belanja modal aset lainnya-aset tidak berwujud direncanakan sebesar Rp49.950.000,00 (empat puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 26

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp2.663.350.377,00 (dua milyar enam ratus enam puluh tiga juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh rupiah), terdiri dari atas belanja tidak terduga.

Pasal 27

Anggaran pembiayaan daerah tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 28

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a direncanakan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah), terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya.

Pasal 29

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), terdiri atas penyertaan modal daerah.

Pasal 30

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah);
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp49.000.000.000,00 (empat puluh sembilan milyar rupiah).

Pasal 31

Uraian lebih lanjut mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
3. Lampiran IIIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah;
4. Lampiran IIIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Hibah Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Hibah
5. Lampiran IVa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Uang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;
6. Lampiran IVb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Alokasi Bantuan Sosial Berupa Barang Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Sosial;

7. Lampiran Va Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Umum Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan;
8. Lampiran Vb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus Yang Diterima Serta SKPD Pemberi Bantuan Keuangan
9. Lampiran VIa Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten
10. Lampiran VIb Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kota
11. Lampiran VIc Daftar Nama Penerima, Alamat dan Besaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Desa

Pasal 32

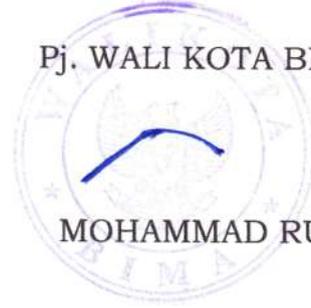
Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 33

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bima.

Ditetapkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Desember 2023

Pj. WALI KOTA BIMA,



MOHAMMAD RUM

Diundangkan di Kota Bima
pada tanggal 29 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA BIMA,



MUKHTAR

BERITA DAERAH KOTA BIMA TAHUN 2023 NOMOR .070



**PERATURAN KEPALA DAERAH
NOMOR 70 TAHUN 2023
TANGGAL 29 DESEMBER 2023**

LAMPIRAN I

**RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI
MENURUT KELOMPOK DAN JENIS
PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024**



KOTA BIMA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.566.402.930,00
4.1.01	Pajak Daerah	25.391.325.685,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	1.112.000.000,00
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	1.112.000.000,00
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	1.112.000.000,00
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	0,00
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	0,00
4.1.01.07	Pajak Restoran	2.502.610.435,00
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.213.000.000,00
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	1.213.000.000,00
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	400.000.000,00
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	400.000.000,00
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	187.000.000,00
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	187.000.000,00
4.1.01.07.04	Pajak Kantin dan Sejenisnya	52.610.435,00
4.1.01.07.04.0001	Pajak Kantin dan Sejenisnya	52.610.435,00
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	325.000.000,00
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	325.000.000,00
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	325.000.000,00
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	325.000.000,00
4.1.01.08	Pajak Hiburan	54.075.000,00
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.025.000,00
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	15.025.000,00
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.050.000,00
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	1.050.000,00
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	38.000.000,00
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	38.000.000,00
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	0,00
4.1.01.09	Pajak Reklame	774.440.250,00
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	600.000.000,00
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	71.440.250,00
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	71.440.250,00
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	103.000.000,00
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	103.000.000,00
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	10.050.000.000,00
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.050.000.000,00
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	10.050.000.000,00
4.1.01.11	Pajak Parkir	170.000.000,00
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	170.000.000,00
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	170.000.000,00
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	54.000.000,00
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	54.000.000,00
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	54.000.000,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	74.200.000,00
4.1.01.13.01	Pajak Sarang Burung Walet	74.200.000,00
4.1.01.13.01.0001	Pajak Sarang Burung Walet	74.200.000,00
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	500.000.000,00
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	266.380.000,00
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	266.380.000,00
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	21.800.000,00
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	21.800.000,00
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	211.820.000,00
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	211.820.000,00
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.100.000.000,00
4.1.01.15.01	PBBP2	5.100.000.000,00
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	5.100.000.000,00
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	5.000.000.000,00
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	5.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	26.597.414.371,00
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	19.430.700.075,00
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	17.030.395.075,00
4.1.02.01.01.0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	2.693.914.275,00
4.1.02.01.01.0005	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah	12.241.080.800,00
4.1.02.01.01.0006	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	2.095.400.000,00
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.024.470.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.02.01.02.0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	1.024.470.000,00
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00
4.1.02.01.04.0001	Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar	440.375.000,00
4.1.02.01.05.0001	Retribusi Pelataran	427.775.000,00
4.1.02.01.05.0002	Retribusi Los	12.600.000,00
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	135.460.000,00
4.1.02.01.09.0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	135.460.000,00
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	6.166.714.296,00
4.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	3.376.310.128,00
4.1.02.02.01.0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.584.950.128,00
4.1.02.02.01.0002	Retribusi Penyewaan Tanah	131.710.000,00
4.1.02.02.01.0003	Retribusi Penyewaan Bangunan	647.400.000,00
4.1.02.02.01.0004	Retribusi Pemakaian Laboratorium	60.000.000,00
4.1.02.02.01.0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	399.900.000,00
4.1.02.02.01.0006	Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	258.000.000,00
4.1.02.02.01.0007	Retribusi Pemakaian Alat	294.350.000,00
4.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	1.384.122.168,00
4.1.02.02.02.0001	Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar Grosir Berbagai Jenis Barang yang Dikontrakkan	1.384.122.168,00
4.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir	456.252.000,00
4.1.02.02.05.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	456.252.000,00
4.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan	90.150.000,00
4.1.02.02.07.0001	Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	90.150.000,00
4.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	852.380.000,00
4.1.02.02.09.0001	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	852.380.000,00
4.1.02.02.11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	7.500.000,00
4.1.02.02.11.0003	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	7.500.000,00
4.1.02.03	Retribusi Perizinan Tertentu	1.000.000.000,00
4.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.02.03.07.0001	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.656.772.700,00
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	1.656.772.700,00
4.1.03.02.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.656.772.700,00
4.1.03.02.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.656.772.700,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	19.920.890.174,00
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	800.826.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	768.706.000,00
4.1.04.01.02.0054	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	673.790.000,00
4.1.04.01.02.0057	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	94.916.000,00
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	15.000.000,00
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00
4.1.04.01.05	Hasil Penjualan Aset Tetap Lainnya	17.120.000,00
4.1.04.01.05.0071	Hasil Penjualan Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya-Barang Koleksi Non Budaya Lainnya	17.120.000,00
4.1.04.05	Jasa Giro	600.000.000,00
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	600.000.000,00
4.1.04.06	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.365.000,00
4.1.04.06.01	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.365.000,00
4.1.04.06.01.0001	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	5.365.000,00
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	3.026.145.840,00
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.026.145.840,00
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	3.026.145.840,00
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.488.053.334,00
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.488.053.334,00
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	15.488.053.334,00
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	500.000,00
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	500.000,00
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	500.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	726.225.039.663,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	664.037.977.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	664.037.977.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	35.932.280.000,00
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	451.216.000,00
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	5.918.720.000,00
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	17.008.771.000,00
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	11.427.023.000,00
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	27.533.000,00
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.099.017.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	488.281.634.000,00
4.2.01.01.02.0001	DAU	419.790.761.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.01.01.02.0002	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	8.200.000.000,00
4.2.01.01.02.0004	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja	20.831.859.000,00
4.2.01.01.02.0005	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	19.710.880.000,00
4.2.01.01.02.0006	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Kesehatan	17.519.713.000,00
4.2.01.01.02.0007	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	2.228.421.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	56.209.507.000,00
4.2.01.01.03.0001	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	860.857.000,00
4.2.01.01.03.0002	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	9.437.615.000,00
4.2.01.01.03.0003	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	9.763.671.000,00
4.2.01.01.03.0006	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	0,00
4.2.01.01.03.0011	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	500.000.000,00
4.2.01.01.03.0017	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	11.376.116.000,00
4.2.01.01.03.0025	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.904.952.000,00
4.2.01.01.03.0034	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	0,00
4.2.01.01.03.0037	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	7.625.496.000,00
4.2.01.01.03.0040	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	6.504.542.000,00
4.2.01.01.03.0059	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	0,00
4.2.01.01.03.0060	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Penguatan Sistem Kesehatan	8.236.258.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	83.614.556.000,00
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	21.964.800.000,00
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	900.000.000,00
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	40.041.951.000,00
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	1.044.001.000,00
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	4.594.670.000,00
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.167.050.000,00
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	3.720.628.000,00
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	427.331.000,00
4.2.01.01.04.0013	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	4.885.869.000,00
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	2.705.932.000,00
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	642.324.000,00
4.2.01.01.04.0019	DAK Non Fisik-Dana Bantuan BLPS	520.000.000,00
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	0,00
4.2.01.06	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.06.01	Insentif Fiskal	0,00
4.2.01.06.01.0001	Insentif Fiskal	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	62.187.062.663,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	62.187.062.663,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	62.187.062.663,00
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	10.635.913.598,00
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.155.931.867,00
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	21.382.493.124,00
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	41.921.250,00
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	21.970.802.824,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	9.764.985.709,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	9.764.985.709,00
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.764.985.709,00
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.764.985.709,00
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	9.764.985.709,00
	Jumlah Pendapatan	809.556.428.302,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	740.402.385.787,00
5.1.01	Belanja Pegawai	437.585.778.868,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	297.925.256.557,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	219.971.967.203,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	185.083.417.851,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	34.888.549.352,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	19.819.902.404,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	16.100.512.586,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	3.719.389.818,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	6.001.116.912,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	5.993.836.912,00
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	7.280.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	20.165.685.268,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	18.416.257.268,00
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	1.749.428.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	4.228.231.172,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	2.945.561.172,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	1.282.670.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	12.855.772.861,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	10.077.328.261,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2.778.444.600,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	539.263.943,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	539.263.943,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	0,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	2.758.754,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	2.538.182,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	220.572,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	12.214.219.351,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	10.515.829.473,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	1.698.389.878,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	531.539.943,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	447.859.431,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	83.680.512,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	1.594.798.746,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	1.343.582.817,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	251.215.929,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	66.971.478.564,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	32.744.728.506,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	29.669.636.419,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.075.092.087,00
5.1.01.02.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	12.388.062.106,00
5.1.01.02.03.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	10.214.068.447,00
5.1.01.02.03.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PPPK	2.173.993.659,00
5.1.01.02.04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	124.647.096,00
5.1.01.02.04.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	124.647.096,00
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	21.714.040.856,00
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	19.663.979.421,00
5.1.01.02.05.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	2.050.061.435,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	57.657.984.312,00
5.1.01.03.01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	592.659.732,00
5.1.01.03.01.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	8.400.000,00
5.1.01.03.01.0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	40.200.000,00
5.1.01.03.01.0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	665.000,00
5.1.01.03.01.0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	15.466.040,00
5.1.01.03.01.0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	252.000.000,00
5.1.01.03.01.0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	2.520.000,00
5.1.01.03.01.0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	1.260.000,00
5.1.01.03.01.0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	840.000,00
5.1.01.03.01.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	14.000.000,00
5.1.01.03.01.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	145.308.692,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.03.01.0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	112.000.000,00
5.1.01.03.02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	452.196.486,00
5.1.01.03.02.0001	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	13.000.000,00
5.1.01.03.02.0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	38.383.520,00
5.1.01.03.02.0004	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	31.362.000,00
5.1.01.03.02.0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	60.348.400,00
5.1.01.03.02.0006	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	8.040.000,00
5.1.01.03.02.0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	169.797.600,00
5.1.01.03.02.0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	11.115.480,00
5.1.01.03.02.0017	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	749.600,00
5.1.01.03.02.0018	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	20.426.400,00
5.1.01.03.02.0022	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	42.973.486,00
5.1.01.03.02.0027	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	6.000.000,00
5.1.01.03.02.0031	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	50.000.000,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	40.041.951.000,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	40.041.951.000,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.044.001.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	1.044.001.000,00
5.1.01.03.06	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.034.311.910,00
5.1.01.03.06.0001	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	7.034.311.910,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	8.492.864.184,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	7.783.624.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	706.240.184,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	3.000.000,00
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	11.121.617.786,00
5.1.01.04.01	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.01.0001	Belanja Uang Representasi DPRD	561.540.000,00
5.1.01.04.02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	53.067.000,00
5.1.01.04.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	53.067.000,00
5.1.01.04.03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.215.220,00
5.1.01.04.03.0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	79.215.220,00
5.1.01.04.04	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00
5.1.01.04.04.0001	Belanja Uang Paket DPRD	56.154.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.04.05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.05.0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	814.233.000,00
5.1.01.04.06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.556.950,00
5.1.01.04.06.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	96.556.950,00
5.1.01.04.07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.663.088,00
5.1.01.04.07.0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	19.663.088,00
5.1.01.04.08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.08.0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	1.890.000.000,00
5.1.01.04.09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	484.312.500,00
5.1.01.04.09.0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	484.312.500,00
5.1.01.04.10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.832,00
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	248.832,00
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	3.687.950.696,00
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	154.560.000,00
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	1.347.696,00
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	4.043.000,00
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	3.528.000.000,00
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.132.000.000,00
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.132.000.000,00
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	246.676.500,00
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	246.676.500,00
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	521.399.585,00
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.762.130,00
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	58.762.130,00
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.594.020,00
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.594.020,00
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.773.850,00
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	105.773.850,00
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.482.434,00
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	7.482.434,00
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	886.352,00
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	886.352,00
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.637,00
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.637,00
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.586.400,00
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	4.586.400,00
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	93.600,00
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	280.800,00
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	230.510.772,00
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	5.360.000,00
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	22.128.869,00
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	237.500,00
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	7.744.403,00
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	92.500.000,00
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	1.200.000,00
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	540.000,00
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	300.000,00
5.1.01.05.10.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000,00
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	53.000.000,00
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	42.500.000,00
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	105.427.590,00
5.1.01.05.11.0001	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Kesehatan	14.297.750,00
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	4.000.000,00
5.1.01.05.11.0004	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	13.436.380,00
5.1.01.05.11.0005	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar	15.213.100,00
5.1.01.05.11.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengujian Kendaraan Bermotor	2.010.000,00
5.1.01.05.11.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1.972.840,00
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	19.500.900,00
5.1.01.05.11.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	2.778.870,00
5.1.01.05.11.0017	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Terminal	187.400,00
5.1.01.05.11.0018	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Khusus Parkir	7.806.600,00
5.1.01.05.11.0020	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Rumah Potong Hewan	836.250,00
5.1.01.05.11.0022	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Rekreasi dan Olahraga	11.887.500,00
5.1.01.05.11.0027	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	1.500.000,00
5.1.01.05.11.0031	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Persetujuan Bangunan Gedung	10.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	526.000.000,00
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	126.000.000,00
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	400.000.000,00
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	2.862.042.064,00
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	2.862.042.064,00
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	2.862.042.064,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	256.444.820.668,00
5.1.02.01	Belanja Barang	73.403.635.187,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	73.403.635.187,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	812.685.600,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	101.339.300,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	3.757.874.875,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	145.296.350,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	7.860.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	718.365.500,00
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	1.429.325.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	71.994.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.316.455.820,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	3.013.896.897,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	7.127.637.453,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	658.648.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	10.550.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.148.638.350,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	6.552.654.680,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	500.602.000,00
5.1.02.01.01.0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	414.350.000,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	1.157.427.825,00
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	5.755.041.451,00
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	515.052.784,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	17.608.762.262,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	17.052.250,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan Penelitian-Persediaan Penelitian Lainnya	500.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	10.764.489.020,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	2.537.942.950,00
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	2.375.438.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1.553.715.000,00
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	81.000.000,00
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	631.000.000,00
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	217.200.000,00
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	135.000.000,00
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	254.950.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	156.049.820,00
5.1.02.01.01.0065	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	135.200.000,00
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	5.000.000,00
5.1.02.01.01.0067	Belanja Pakaian Penyelamatan	14.040.000,00
5.1.02.01.01.0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	188.750.000,00
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	252.450.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	119.400.000,00
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Paskibraka	140.000.000,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	97.168.551.753,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	77.408.308.587,00
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	3.868.720.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	6.582.630.000,00
5.1.02.02.01.0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara	115.200.001,00
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	945.400.000,00
5.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	72.350.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	908.400.000,00
5.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	59.975.000,00
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	648.000.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	4.531.000.000,00
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	7.835.371.275,00
5.1.02.02.01.0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	81.500.000,00
5.1.02.02.01.0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	351.300.800,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	469.000.000,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	432.000.000,00
5.1.02.02.01.0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	6.594.000.000,00
5.1.02.02.01.0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	74.600.000,00
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	161.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	2.789.864.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	124.700.000,00
5.1.02.02.01.0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	19.898.000.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	682.550.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	1.999.500.000,00
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	337.400.000,00
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	82.800.000,00
5.1.02.02.01.0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	54.000.000,00
5.1.02.02.01.0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	6.000.000,00
5.1.02.02.01.0037	Belanja Jasa Juri Pertombaan/Pertandingan	482.700.000,00
5.1.02.02.01.0038	Belanja Jasa Tata Rias	8.600.000,00
5.1.02.02.01.0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	186.680.350,00
5.1.02.02.01.0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	678.000.000,00
5.1.02.02.01.0050	Belanja Jasa Kalibrasi	34.366.000,00
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	92.618.000,00
5.1.02.02.01.0052	Belanja Jasa Pembersihan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	25.435.500,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	2.586.000.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	6.824.323.912,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	4.065.743.382,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	57.500.000,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	53.985.000,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	1.581.556.000,00
5.1.02.02.01.0073	Belanja Medical Check Up	255.000.000,00
5.1.02.02.01.0077	Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi Non ASN	770.539.367,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.497.402.232,00
5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	10.920.000.000,00
5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	941.808.000,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	282.475.536,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	353.118.696,00
5.1.02.02.03	Belanja Sewa Tanah	6.000.000,00
5.1.02.02.03.0035	Belanja Sewa Lapangan Lainnya	6.000.000,00
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	1.719.187.000,00
5.1.02.02.04.0034	Belanja Sewa Alat Bantu Lainnya	57.500.000,00
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	73.066.000,00
5.1.02.02.04.0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	7.500.000,00
5.1.02.02.04.0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	49.200.000,00
5.1.02.02.04.0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0118	Belanja Sewa Mebel	4.150.000,00
5.1.02.02.04.0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	3.000.000,00
5.1.02.02.04.0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	30.000.000,00
5.1.02.02.04.0195	Belanja Sewa Sumber Tenaga	3.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.04.0355	Belanja Sewa Peralatan Umum	1.454.271.000,00
5.1.02.02.04.0364	Belanja Sewa Photo and Film Equipment	7.500.000,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.014.286.000,00
5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	15.000.000,00
5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	1.497.000,00
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	206.000.000,00
5.1.02.02.05.0036	Belanja Sewa Taman	44.200.000,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	268.990.000,00
5.1.02.02.05.0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	478.599.000,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	2.163.712.125,00
5.1.02.02.08.0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	185.700.000,00
5.1.02.02.08.0008	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Air	274.000.280,00
5.1.02.02.08.0009	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi	750.000.000,00
5.1.02.02.08.0013	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	90.000.000,00
5.1.02.02.08.0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	8.395.000,00
5.1.02.02.08.0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	139.200.000,00
5.1.02.02.08.0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	4.795.200,00
5.1.02.02.08.0028	Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pengujian dan Analisa Komposisi dan Tingkat Kemurnian	4.800.000,00
5.1.02.02.08.0032	Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Lingkungan	706.821.645,00
5.1.02.02.09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	664.085.350,00
5.1.02.02.09.0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	351.399.350,00
5.1.02.02.09.0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	210.000.000,00
5.1.02.02.09.0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	102.686.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	88.176.000,00
5.1.02.02.10.0004	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Air Minum	88.176.000,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	215.000.000,00
5.1.02.02.11.0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	140.000.000,00
5.1.02.02.11.0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	75.000.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	1.131.206.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	402.900.000,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	30.000.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	220.378.000,00
5.1.02.02.12.0004	Belanja Diklat Kepemimpinan	477.928.000,00
5.1.02.02.13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	253.988.459,00
5.1.02.02.13.0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3.600.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.02.13.0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	17.220.000,00
5.1.02.02.13.0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	285.000,00
5.1.02.02.13.0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	6.628.304,00
5.1.02.02.13.0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	108.000.000,00
5.1.02.02.13.0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	1.080.000,00
5.1.02.02.13.0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	540.000,00
5.1.02.02.13.0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	360.000,00
5.1.02.02.13.0014	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	6.000.000,00
5.1.02.02.13.0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	62.275.155,00
5.1.02.02.13.0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	48.000.000,00
5.1.02.02.14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	7.200.000,00
5.1.02.02.14.0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	7.200.000,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	11.270.735.230,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.677.215.750,00
5.1.02.03.02.0009	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Loader	33.075.000,00
5.1.02.03.02.0012	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Besar Darat-Alat Besar Darat Lainnya	32.433.750,00
5.1.02.03.02.0034	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Alat Bantu Lainnya	66.000.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	845.360.000,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	83.820.000,00
5.1.02.03.02.0039	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	14.000.000,00
5.1.02.03.02.0043	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	2.992.860.000,00
5.1.02.03.02.0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.000.000,00
5.1.02.03.02.0068	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Bermesin-Alat Bengkel Bermesin Lainnya	8.000.000,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	609.637.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	332.910.000,00
5.1.02.03.02.0124	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pemadam Kebakaran	3.000.000,00
5.1.02.03.02.0132	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0145	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Khusus	2.000.000,00
5.1.02.03.02.0148	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Lainnya	50.400.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.03.02.0176	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Peralatan Penerima	15.000.000,00
5.1.02.03.02.0237	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	21.200.000,00
5.1.02.03.02.0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	20.000.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	319.520.000,00
5.1.02.03.02.0494	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	200.000.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	4.667.619.480,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	3.463.619.480,00
5.1.02.03.03.0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	0,00
5.1.02.03.03.0008	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah	100.000.000,00
5.1.02.03.03.0018	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara	13.000.000,00
5.1.02.03.03.0030	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	300.000.000,00
5.1.02.03.03.0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	791.000.000,00
5.1.02.03.04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	925.000.000,00
5.1.02.03.04.0004	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kota	425.000.000,00
5.1.02.03.04.0024	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Waduk Irigasi	200.000.000,00
5.1.02.03.04.0069	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembawa Air Kotor	300.000.000,00
5.1.02.03.05	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	900.000,00
5.1.02.03.05.0034	Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Alat Bercorak Kebudayaan-Barang Kerajinan	900.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	43.319.332.709,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	43.319.332.709,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	24.733.843.709,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	11.469.909.000,00
5.1.02.04.01.0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.954.880.000,00
5.1.02.04.01.0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	160.700.000,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.583.315.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.383.315.000,00
5.1.02.05.01.0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	2.974.865.000,00
5.1.02.05.01.0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	8.450.000,00
5.1.02.05.01.0005	Belanja Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	400.000.000,00
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	200.000.000,00
5.1.02.05.02.0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	200.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.097.240.000,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.097.240.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa BOS	20.097.240.000,00
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.602.010.789,00
5.1.02.99.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.602.010.789,00
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dan Jasa BLUD	7.602.010.789,00
5.1.05	Belanja Hibah	42.773.486.251,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	38.983.070.251,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.541.881.000,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	22.541.881.000,00
5.1.05.05.02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	820.000.000,00
5.1.05.05.02.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	820.000.000,00
5.1.05.05.03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.621.189.251,00
5.1.05.05.03.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	15.621.189.251,00
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	2.812.560.000,00
5.1.05.06.02	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.812.560.000,00
5.1.05.06.02.0001	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	2.812.560.000,00
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	977.856.000,00
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	977.856.000,00
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	977.856.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.598.300.000,00
5.1.06.01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	119.500.000,00
5.1.06.01.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	119.500.000,00
5.1.06.01.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	119.500.000,00
5.1.06.02	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	2.578.800.000,00
5.1.06.02.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	2.578.800.000,00
5.1.06.02.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Keluarga	2.578.800.000,00
5.1.06.03	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	900.000.000,00
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	900.000.000,00
5.1.06.03.01.0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	900.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	115.490.692.138,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.842.449.000,00
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	1.842.449.000,00
5.2.01.01.01	Belanja Modal Tanah Persil	1.731.555.400,00
5.2.01.01.01.0007	Belanja Modal Tanah Persil Lainnya	1.731.555.400,00
5.2.01.01.02	Belanja Modal Tanah Non Persil	110.893.600,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.01.01.02.0009	Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	110.893.600,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.934.169.076,00
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	600.000.000,00
5.2.02.01.01	Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00
5.2.02.01.01.0011	Belanja Modal Mesin Proses	0,00
5.2.02.01.03	Belanja Modal Alat Bantu	600.000.000,00
5.2.02.01.03.0004	Belanja Modal Electric Generating Set	600.000.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	4.052.522.500,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.052.522.500,00
5.2.02.02.01.0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	551.822.500,00
5.2.02.02.01.0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	100.700.000,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.400.000.000,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	234.470.500,00
5.2.02.03.01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	198.170.500,00
5.2.02.03.01.0003	Belanja Modal Perkakas Bengkel Listrik	78.650.000,00
5.2.02.03.01.0010	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	119.520.500,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	36.300.000,00
5.2.02.03.02.0007	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kerja	36.300.000,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	5.225.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	5.225.000,00
5.2.02.04.01.0005	Belanja Modal Alat Laboratorium Pertanian	5.225.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.718.063.770,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	239.806.600,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	239.806.600,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.167.707.170,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	343.414.010,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	427.329.980,00
5.2.02.05.02.0005	Belanja Modal Alat Dapur	23.000.000,00
5.2.02.05.02.0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	373.963.180,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	310.550.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	105.450.000,00
5.2.02.05.03.0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	100.100.000,00
5.2.02.05.03.0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	68.500.000,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	2.700.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	33.800.000,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	235.243.940,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	235.243.940,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	112.777.940,00
5.2.02.06.01.0004	Belanja Modal Peralatan Cetak	122.466.000,00
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.509.948.500,00
5.2.02.07.02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	6.509.948.500,00
5.2.02.07.02.0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	6.509.948.500,00
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	281.017.140,00
5.2.02.08.01	Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	170.775.000,00
5.2.02.08.01.0056	Belanja Modal Alat Laboratorium Lain	170.775.000,00
5.2.02.08.03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	110.242.140,00
5.2.02.08.03.0016	Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	110.242.140,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.462.557.500,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.983.785.500,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.845.585.500,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	138.200.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	478.772.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	55.572.000,00
5.2.02.10.02.0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	95.000.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	328.200.000,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	33.300.000,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	33.300.000,00
5.2.02.19.01.0006	Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya	33.300.000,00
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.801.820.226,00
5.2.02.99.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.801.820.226,00
5.2.02.99.99.9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	1.801.820.226,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	43.281.871.893,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	42.881.871.893,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	42.881.871.893,00
5.2.03.01.01.0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	7.179.153.813,00
5.2.03.01.01.0002	Belanja Modal Bangunan Gudang	80,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	21.091.368.000,00
5.2.03.01.01.0014	Belanja Modal Bangunan Gedung Garasi/Pool	50.000.000,00
5.2.03.01.01.0029	Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan	10.000.000,00
5.2.03.01.01.0036	Belanja Modal Taman	12.101.350.000,00
5.2.03.01.01.0037	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	2.450.000.000,00
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	400.000.000,00
5.2.03.04.01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	400.000.000,00
5.2.03.04.01.0004	Belanja Modal Pagar	400.000.000,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	52.208.502.169,00
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	21.940.132.019,00
5.2.04.01.01	Belanja Modal Jalan	21.703.723.386,00
5.2.04.01.01.0004	Belanja Modal Jalan Kota	13.707.543.386,00
5.2.04.01.01.0005	Belanja Modal Jalan Desa	7.996.180.000,00
5.2.04.01.02	Belanja Modal Jembatan	236.408.633,00
5.2.04.01.02.0005	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Desa	236.408.633,00
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	25.683.370.150,00
5.2.04.02.01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	2.604.290.000,00
5.2.04.02.01.0001	Belanja Modal Bangunan Waduk Irigasi	3.030.000,00
5.2.04.02.01.0008	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya	2.601.260.000,00
5.2.04.02.06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	14.110.380.000,00
5.2.04.02.06.0002	Belanja Modal Bangunan Pengambilan Air Bersih/Air Baku	14.110.380.000,00
5.2.04.02.07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	8.968.700.150,00
5.2.04.02.07.0001	Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	6.756.200.150,00
5.2.04.02.07.0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	2.212.500.000,00
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	1.705.000.000,00
5.2.04.03.01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1.705.000.000,00
5.2.04.03.01.0001	Belanja Modal Instalasi Air Permukaan	5.000.000,00
5.2.04.03.01.0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1.700.000.000,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	2.880.000.000,00
5.2.04.04.02	Belanja Modal Jaringan Listrik	2.880.000.000,00
5.2.04.04.02.0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	2.880.000.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	173.750.000,00
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	173.750.000,00
5.2.05.01.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	173.750.000,00
5.2.05.01.01.0001	Belanja Modal Buku Umum	166.700.000,00
5.2.05.01.01.0012	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	7.050.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	49.950.000,00
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	49.950.000,00
5.2.06.01.01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	49.950.000,00
5.2.06.01.01.0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	49.950.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.663.350.377,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.663.350.377,00
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.663.350.377,00
5.3.01.01.01	Belanja Tidak Terduga	2.663.350.377,00
5.3.01.01.01.0001	Belanja Tidak Terduga	2.663.350.377,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Jumlah Belanja	858.556.428.302,00
	Total Surplus/(Defisit)	-49.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	50.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	50.000.000.000,00
6.1.01.05	Penghematan Belanja	50.000.000.000,00
6.1.01.05.01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	50.000.000.000,00
6.1.01.05.01.0001	Penghematan Belanja Pegawai-Gaji dan Tunjangan ASN	18.400.000.000,00
6.1.01.05.01.0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	16.600.000.000,00
6.1.01.05.01.0008	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Jasa	15.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.000.000.000,00
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
6.2.02.02.01.0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	1.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	49.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Bima, 29 Desember 2023

Pj Walikota

